

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi saat ini secara langsung membawa perubahan besar dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia yang kian terbuka dan transparan. Setelah Orde Baru tumbang, Indonesia secara terus menerus menuju pada tahapan institusionalisasi demokrasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam banyak bidang, di antaranya dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sejak tahun 1999, Indonesia telah mencatat keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta transparan. Kemudian dilanjutkan dengan keberhasilan menyelenggarakan secara berturut-turut pemilu Presiden, Pemilu Legislatif serta Pemilukada di seluruh Indonesia.

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Mengutip Golden, Firmanzah mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi (Firmanzah, 2008:125). Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.

Pada pemilu, anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat seperti ini merupakan penjabaran dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat. Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Sebagaimana inti dari konsepsi demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Mochtar Mas' oed, 2003:43)

Semakin besar prosentase pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, maka semakin baik pula kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, penting untuk diupayakan agar pemilih datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Bagi penyelenggara, salah satu ukuran kesuksesan suatu pemilu diukur dari seberapa besar jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara. Hal tersebut disebabkan karena pemilu merupakan ajang pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin.

Menjelang pemilu tahun 2014 ada 34 partai politik yang mendaftar ke KPU untuk dapat ikut serta dalam pemilu, namun setelah ditetapkan hanya ada 12 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak maju sebagai peserta pemilu. Partai-partai tersebut adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Demokrasi

Indonesia (PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indoonesia, dan Partai Nasdem. Berdasarkan 12 partai tersebut, Sebelas partai merupakan partai lama dan satu partai merupakan partai baru dan belum pernah mengikuti pemilu yaitu partai Nasdem (<http://www.voaindonesia.com>)

Kehadiran Partai Baru peserta Pemilu tahun 2014 yaitu Partai Nasdem. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta (www.partainasdem.org). Berdirinya Partai Nasdem tidak bisa dilepaskan dengan kemunculan Ormas Nasional Demokrat yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasdem. Hal ini mengingat kemiripan antara Lambang Partai Nasdem dengan Ormas Nasional Demokrat, kemudian ditambah dengan duduknya Surya Paloh yang merupakan salah satu Pendiri Ormas Nasional Demokrat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.

Untuk mencapai tujuan jangka panjang, suatu partai politik harus memiliki strategi yang efektif agar eksistensinya bisa bertahan lama. Partai politik harus secara konsisten mengaitkan dan menerjemahkan ideologi politiknya dalam pesan dan isu politik yang dapat dengan mudah dipahami masyarakat sekaligus menyentuh permasalahan publik.

Sebagai partai baru, Partai Nasdem gencar melakukan pemasaran politik agar perolehan suaranya dalam pemilu 2014 tidak kalah dengan partai lama yang telah memiliki segmen pemilih sendiri. Kabupaten Jepara sendiri

merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik dan kemajemukan penduduk yang sangat beragam. Meskipun di beberapa tempat di Kabupaten Jepara merupakan basis massa partai-partai lama, namun kehadiran Partai Nasdem cukup potensial untuk mempengaruhi pikiran para pemilih.

Setelah dilakukannya Pemilu DPRD Kabupaten Jepara pada tanggal 9 April 2014, Partai Nasdem memperoleh suara yang cukup signifikan dan mampu bersaing dengan partai-partai lama yang telah mempunyai basis pemilih. Hal ini dibuktikan dengan tabel hasil rekapitulasi perolehan suara dan kursi dalam pemilu legislatif Kabupaten Jepara dibawah ini;

Tabel 1.1

**Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu legislatif Kabupaten Jepara
Tahun 2014**

No	Partai Politik	Perolehan suara	Jumlah Kursi
1	Partai Nasdem	62378	5
2	Partai Kebangkitan Bangsa	61600	5
3	Partai Keadilan Sejahtera	34369	2
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	113769	10
5	Partai Golongan Karya	58831	5
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	102545	8
7	Partai Demokrat	25430	2
8	Partai Amanat Nasional	33934	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	120990	9
10	Partai Hati Nurani Rakyat	21011	1
11	Partai Bulan Bintang	1847	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indoonesia	2084	0
Jumlah		638788	50

Sumber : KPUD Kabupaten Jepara 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perolehan kursi terbanyak diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil meraih 10 kursi, yang kemudian disusul Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 9 kursi. Selanjutnya Partai Gerindra memperoleh 8 kursi. Partai Nasdem, PKB, dan Golkar yang masing-masing memperoleh 5 kursi, kemudian PAN memperoleh 3 kursi. Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat masing-masing memperoleh 2 kursi, dan terakhir satu kursi dimiliki oleh partai Hanura. Hal ini terlihat bahwa partai baru yaitu Partai Nasdem dapat bersaing dengan partai-partai besar lain. selain itu Sebagai partai baru, Partai Nasdem juga menawarkan perubahan dan restorasi untuk Indonesia.

Melihat lebih jauh lagi, Jawa Tengah merupakan basis pemilih Islam tradisional seperti PKB dan PPP, yang terutama berada di wilayah Pantura (kabar24.bisnis.com). Dalam budaya Jawa Islam tradisional, Sosok Kyai merupakan tokoh sentral yang memainkan peran penting dalam menggerakkan aksi-aksi sosial keagamaan aksi politik di masyarakat. Kyai merupakan gelar sakral dalam tradisi Jawa yang tidak mungkin diperoleh sembarang orang, melainkan hanya manusia-manusia terpilih yang dianugerahi keutamaan oleh Allah SWT (Sukanto, 1999: 84).

Banyaknya para kyai yang bernaung di Jawa Tengah, menjadikan provinsi ini sebagai titik sentrum simpul massa Nahdliyyin terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur. Bahkan dalam tiap pagelaran Pemilu, mereka kerap menjadi pendulang suara besar bagi partai yang didukung NU (Ahmad Khoir, 2005:9). Namun kejayaan partai yang berbasis NU mulai tergerus

dengan kemunculan partai baru, yaitu Partai Nasdem yang mampu meraih suara yang cukup signifikan di basis massa partai NU.

Keberhasilan Partai Nasdem sebagai partai baru dalam memperoleh suara yang cukup signifikan dalam Pemilu legislatif Kabupaten Jepara pada tahun 2014, tidak terlepas dari strategi yang dibuat oleh Partai Nasdem. Strategi yang dilakukan Partai Nasdem sebelum pemilu dimulai yaitu, dengan merancang target untuk dapat menduduki tiga besar partai politik pemenang pemilu di Kabupaten Jepara. Hal ini, kemudian didukung dengan adanya sekitar 100 ribu anggota yang tersebar di seluruh Kabupaten Jepara (www.murianews.com).

Selain strategi tersebut, Partai Nasdem menempatkan calon anggota legislatif yang mempunyai kualitas dan kepopuleran di tengah masyarakat, seperti contoh; Ketua Partai, Kepala Desa, Ketua Organisasi, PNS, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat. Dengan cara seperti itu, diharapkan perolehan suara disetiap Dapil mampu mengungguli perolehan suara partai lain.

Menilik dari kesuksesan Partai Nasdem sebagai partai baru dalam memperoleh suara pada Pemilu Legislatif Kabupaten Jepara tahun 2014, maka perlu dikaji sejauh mana strategi pemasaran Partai Nasdem dalam meyakinkan pemilih pada pemilu legislatif. Berdasarkan asumsi tersebut, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi pemasaran Partai Nasdem dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Pemasaran Partai Nasdem dalam memperoleh suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan partai lama pada Pemilu legislatif Kabupaten Jepara tahun 2014.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Pemasaran Partai Nasdem dalam memperoleh suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan partai lama pada Pemilu legislatif Kabupaten Jepara tahun 2014?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Strategi Pemasaran Partai Nasdem dalam memperoleh suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan partai lama pada Pemilu legislatif Kabupaten Jepara tahun 2014?

I.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Strategi Pemasaran Partai Nasdem sebagai Partai Baru dalam memperoleh suara yang signifikan dibandingkan dengan partai lama pada Pemilu legislatif Kabupaten Jepara tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pemasaran Partai Nasdem dalam memperoleh suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan partai lama pada Pemilu legislatif Kabupaten Jepara tahun 2014.

b. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi stakeholkder terkait dalam upaya partai baru untuk memperoleh sebanyak mungkin suara dalam pemilu legislatif di tahun-tahun mendatang.
2. Penelitian ini berguna bagi masyarakat agar mengetahui jati diri partai dalam melakukan kampanye.